



RENCANA STRATEGIS (RESNTRA)

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) dapat diselesaikan. Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara.

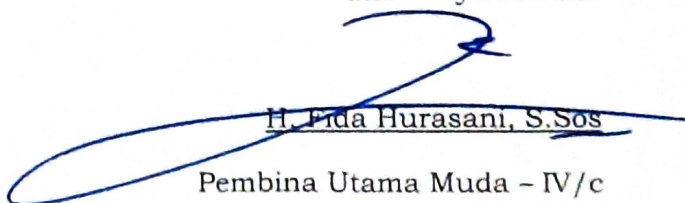
Dengan tersusunnya Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 ini, diharapkan bermanfaat bagi kita semua dengan harapan peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu Penyelenggaraan urusan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat khususnya pada sub urusan Kebakaran dapat mendukung pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 yakni dengan Visi adalah Kutai Kartanegara Idaman Terbaik :

“Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) ini, kami ucapkan Sekian dan Terima Kasih.

Tenggarong, 15 Januari 2026

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan



H. Fida Hurasani, S.Sos

Pembina Utama Muda - IV/c

NIP. 19731101 200012 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	5
BAB I PENDAHULUAN	14
1.1	13
1.2	15
1.3	18
1.4	19
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	22
2.1	24
1)	24
2)	26
3)	28
2.2	42
2.3	46
2.4	Error! Bookmark not defined.57
2.5	64
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	68
3.1	Error! Bookmark not defined.
3.2	Error! Bookmark not defined.
3.3	Error! Bookmark not defined.
3.4	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	73
4.1	72
4.2	72
4.3	73

4.5 Error! Bookmark not defined.

4.6 115

BAB V PENUTUP 117

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	25
Tabel 2. 2 Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Menurut Data Pilah Laki-Laki/Perempuan.	25
Tabel 2. 3 Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Menurut Kualifikasi Pendidikan	25
Tabel 2. 4 Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Menurut Kualifikasi Pangkat/Golongan	26
Tabel 2. 5 Aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	28
Tabel 2. 6 Tanah Milik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	29
Tabel 2. 7 Peralatan, Mesin dan Kendaraan Kantor	31
Tabel 2. 8 38	
Tabel 2. 9 Aset Tak Berwujud Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara	42
Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Pelayanan berdasarkan IKK Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara	44
Tabel 2. 11 Pencapaian SPM pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara	46
Tabel 2. 12 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah	66
Tabel 3. 1 Tujuan Perangkat Daerah	67
Tabel 3. 2 Sasaran Perangkat Daerah	68
Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	69
Tabel 3. 4 Penahapan Renstra Perangkat Daerah	70
Tabel 3. 5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	71
Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah	78
Tabel 4. 2 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan	94
Tabel 4. 3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	112
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	115
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara	24
--	----



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

Jl. AP.MangkunegoroKel.TimbauTelp. (0541) 661009,
Website : <https://damkarmatankukarkab.go.id> Email : damkarmatan@kukarkab.go.id Kode
75511

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NOMOR : P. 34 /Damkarmatan-Set//100.3/12/2024

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025-2029

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan program Rencana Strategis (RENSTRA) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dipandang perlu dibentuk tim penyusunan program Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan tim penyusunan program Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur kedalam Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional (RPJPN) 2004-2025 ;
 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun 2022 Nomor 153);

10. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Memperhatikan : Permendagri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Tim Penyusunan Program Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025- 2029 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan susunan Personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama adalah
1. Menyiapkan bahan/data dari bidang guna mendukung kegiatan penyusunan Renstra SKPD;
 2. Menyiapkan dan merumuskan program Renstra;
 3. Mengadakan Rapat Tim untuk penyusunan Renstra;
 4. Menyusun Laporan Hasil Rapat;
 5. Melaporkan hasil penyusunan Renstra kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 18 Desember 2024



DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nomor : P.34/Damkarmatan-Set/100.3/12/2024
Tanggal : 18 Desember 2024
Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan Rencana
Strategis (Renstra) 2025-2029 Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kab. Kutai Kartanegara

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Penanggung Jawab	
2	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Koordinator	
3	Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan	Ketua	
4	Kasubbag Umum		
4	Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Sekretaris	
5	Kabid Pencegahan	Anggota	
6	Kabid Pemadaman dan Penyelamatan	Anggota	
7	Kabid Pengadaan Sarana dan Prasarana	Anggota	
8	Kasi Pencegahan dan Inspeksi	Anggota	
9	Kasi Peningkatan Kapasitas Aparatur	Anggota	
10	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha	Anggota	
11	Kasi Pengendalian Operasi dan Komunikasi	Anggota	
12	Kasi Pemadaman dan Investigasi	Anggota	
13	Kasi Penyelamatan dan Evakuasi	Anggota	
14	Kasi Pengadaan Sarana dan Prasarana	Anggota	
15	Kasi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana	Anggota	
16	Kasi Informasi dan Pengolahan Data	Anggota	
17	M. Fazrin Winanda	Anggota	
18	Hairifa Fikria,Amd,Kes	Anggota	
19	An Nazhari Lirazni	Anggota	

Ditetapkan di : Tenggara
Pada tanggal : 18 Desember 2024



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra disusun dengan memperhitungkan perkembangan strategis lingkungan internal dan eksternal serta dengan melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Renstra Perangkat Daerah berisi gambaran tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan tersebut nantinya diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya secara metodelis.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanahkan setiap satuan kerja perangkat daerah untuk menyusun Renstra yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD). Setiap Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan bersifat indikatif. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 juga menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan yang diinginkan, maka penyusunan Renstra harus melibatkan stakeholder sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berkoordinasi dengan BAPPEDA.

Selanjutnya, urusan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran merupakan sub urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Untuk mencapai pemenuhan layanan perlindungan masyarakat bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan maka pemerintah daerah membentuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan pemadaman kebakaran dan penyelamatan.

Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan wajib menyusun Rancangan Awal Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu, Rancangan Awal Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diharapkan dapat menyelaraskan perencanaan teknis operasional organisasi yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Proses penyusunan dokumen Renstra ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang pedoman Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam penyusunan Renstra SKPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yakni arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai Organisasi Perangkat Daerah dalam lima tahun kedepan, serta langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Rancangan Awal Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja (Renja) dan Anggaran (RKA). Selain itu Rancangan Awal Renstra juga menjadi salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang kebakaran dan Penyelamatan serta akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang mendasari Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara 2025 - 2029 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2005-2025;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman

Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di Daerah;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 07 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun

2023-2042;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2025 – 2045 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 180);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua tentang Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029;
31. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
32. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 03 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
33. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300.1.7/4344/SJ tanggal 15 Agustus 2023 tentang Optimalisasi Penanggulangan Layanan Kebakaran dan Penyelamatan di Daerah;
34. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1/1925/SJ tanggal 20 April 2017 dan Nomor 364.1/1967/SJ tanggal 25 April 2017 tentang Peningkatan Kesejahteraan Petugas Pemadam Kebakaran di Daerah;
35. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 360/2903/SJ tanggal 3 Juni 2015 tentang Pedoman Pendanaan Tanggap Darurat Bencana yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga;
36. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor B-2838/BAPP/065.11/06/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

37. Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 09-7053-2004 tentang Kendaraan dan Peralatan Pemadam Kebakaran-Pompa;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara 2025 - 2029 ini mempunyai maksud sebagai berikut:

1. Menguraikan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 ke dalam Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran.
2. Menjadi pedoman dalam menyusun program dan kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran periode 2025- 2029.
3. Menentukan arah kebijakan, sasaran, program, dan kegiatan prioritas dalam perencanaan jangka menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
4. Menyediakan dasar evaluasi kinerja penyelenggaraan di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran yang transparan dan akuntabel, sebagaimana tercermin dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara 2025 – 2029 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjadi Pedoman dalam menjabarkan visi Misi ke dalam Strategi Program dan Kegiatan Prioritas yang terencana Sistematis dan berkesinambungan selama 5 Tahun pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan organisasi sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

3. Menjadi pedoman dalam menentukan prioritas program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Tahunan;
4. Memudahkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui program kegiatan yang akan dilaksanakan secara terukur dan terarah.

1.4 Sistematika Penyusunan

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 - 2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan;
- 1.3 Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4 Sistematika Penyusunan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah;
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah;
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan;
 - 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan;
 - 2.1.6 Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah;
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - 2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

- 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 – 2029;
- 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 – 2029;
- 3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029; dan

- 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

- 4.1 Uraian Program;
- 4.2 Uraian Kegiatan;
- 4.3 Uraian Sub Kegiatan;
- 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
- 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.

BAB V Penutup

Kesimpulan

Kaidah Pelaksanaan

Pengendalian dan Evaluasi

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota urusan kebakaran adalah sub urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan kebakaran diwadahi dalam perangkat daerah yang berbentuk dinas. Oleh karena itu, sejak akhir 2022 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara membentuk perangkat daerah mandiri untuk melaksanakan pelayanan dasar bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dilaksanakan oleh perangkat daerah mandiri. Pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

a) Tugas

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan maka tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya sub bidang pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan

non kebakaran yang menjadi kewenangan daerah.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan fungsi:

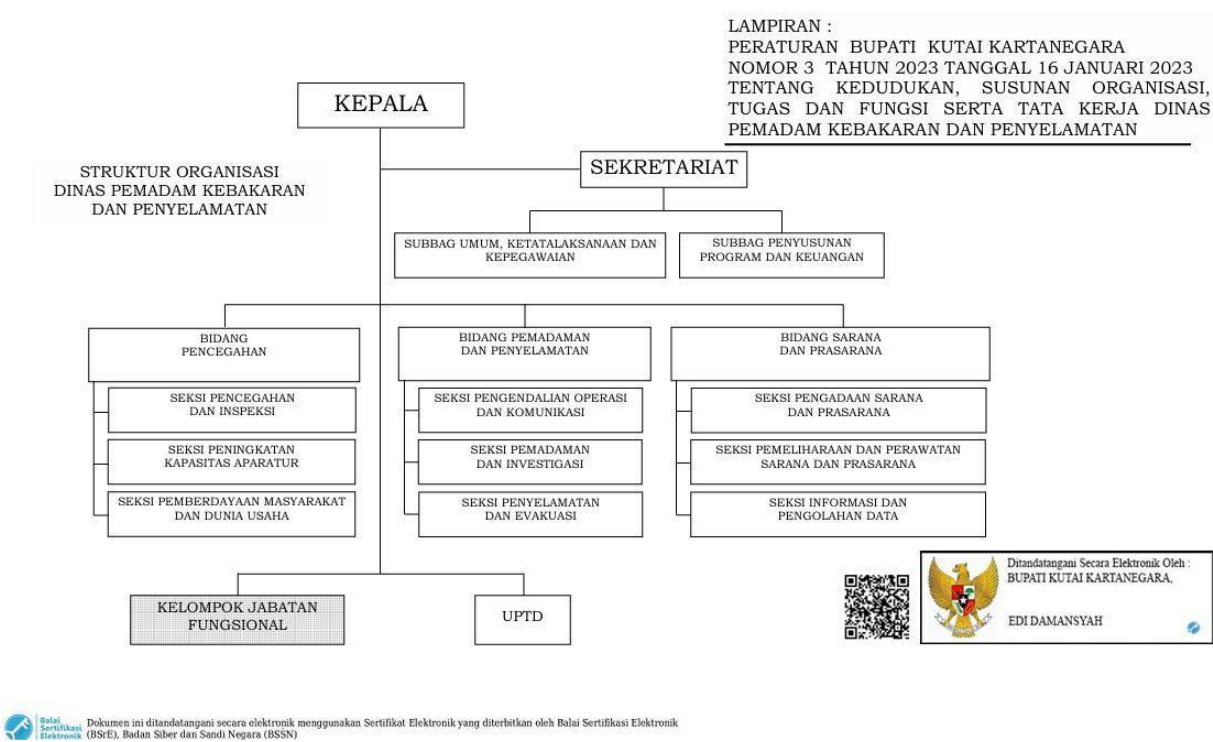
- 2.1) Perumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data dan informasi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat khususnya sub bidang pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
- 2.2) Merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya sub bidang pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
- 2.3) Merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan program kerja di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya sub bidang pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
- 2.4) Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya sub bidang pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran; dan
- 2.5) Mengoordinasikan penyusunan laporan rutin dan tahunan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya sub bidang pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

c) Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022, pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan perangkat daerah dengan Tipe B. Lebih lanjut Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2023

menyebutkan bahwa struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat;
 - a) Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian; dan
 - b) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan.
- 3) Bidang Pencegahan;
 - a) Seksi Pencegahan dan Inspeksi;
 - b) Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur; dan
 - c) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha.
- 4) Bidang Pemadaman dan Penyelamatan;
 - a) Seksi Pengendalian Operasi dan Komunikasi;
 - b) Seksi Pemadaman dan Investigasi; dan
 - c) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi.
- 5) Bidang Sarana dan Prasarana;
 - a) Seksi Pengadaan Sarana Prasarana;
 - b) Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Prasarana; dan
 - c) Seksi Informasi dan Pengolahan Data
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 7) UPTD.



Gambar 2. 1
Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Kutai Kartanegara

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan maka tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan bermasyarakat Urusan Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya Sub bidang Kebakaran yang mencakup Sumber Daya Manusia dan Asset/Modal.

a) Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdapat Sumber Daya Manusia yang memadai. Adapun Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan saat ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 1
Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

NO	URAIAN SDM	JUMLAH
1	PNS	72 Orang
2	PPPK	199 Orang
3	Outsourcing	127 Orang
Total		398 Orang

Sumber: Sub Bagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian, 2025

Tabel 2. 2
Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Menurut Data Pilah Laki-Laki/Perempuan.

LAKI-LAKI	PEREMPUAN
329	69

Sumber: Sub Bagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian, 2025

Tabel 2. 3
Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Menurut Kualifikasi Pendidikan

NO	JENJANG PENDIDIKAN	ASN
1	S2	2
2	S1	66

NO	JENJANG PENDIDIKAN	ASN
3	DIII	2
4	SMA	317
5	SMP	10
6	SD	1

Sumber: Sub Bagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian, 2025

Tabel 2. 4
 Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Menurut Kualifikasi Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT / GOLONGAN	ASN
1	Pembina Utama Muda	1
2	Pembina	3
3	Penata TK I	12
4	Penata	1
5	Penata Muda TK I	5
6	Penata Muda	12
7	Pengatur TK I	29
8	Pengatur	6
9	Pengatur Muda TK I	1
10	Pengatur Muda	2
11	Pemadam Kebakaran Pemula	147
12	Penata Layanan Operasional	24
13	Pengadministrasi Perkantoran	20

Sumber: Sub Bagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian, 2025

Struktur kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan ketergantungan yang signifikan pada tenaga non-PNS. Sebagian besar SDM merupakan tenaga kontrak, terdiri dari PPPK sekitar 50% dan Outsourcing sekitar 31.91%. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar operasional harian disokong oleh tenaga kerja dengan status kepegawaian tidak permanen atau kontrak.

Dinas Pemadam Kebakaran memiliki dominasi gender yang sangat jelas. Jumlah laki-laki (329 orang) mencapai lebih dari empat perlima (sekitar 82.66%) dari total SDM, sementara perempuan hanya berjumlah 69 orang (sekitar 17.34%). Hal ini mencerminkan karakteristik pekerjaan pemadam kebakaran yang secara tradisional

didominasi oleh laki-laki, meskipun ada peran signifikan yang diemban oleh perempuan di dinas ini.

Dari sisi kualifikasi pendidikan, mayoritas besar SDM (79.65% atau 317 orang) memiliki kualifikasi pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA). Kualifikasi pendidikan tinggi (S1, S2, DIII) hanya menyumbang sekitar 17.58%. Tingginya proporsi lulusan SMA menunjukkan bahwa fokus perekrutan dan kebutuhan utama dinas adalah pada tenaga teknis operasional lapangan yang mensyaratkan pelatihan fisik dan keterampilan dasar, bukan pada keahlian akademik tingkat lanjut. Ini juga menjadi tantangan dalam hal pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas SDM secara struktural.

Dilihat dari kualifikasi pangkat/jabatan (khususnya yang terdata 263 orang), terdapat konsentrasi yang sangat tinggi pada jabatan operasional pemula. Jabatan "Pemadam Kebakaran Pemula" mendominasi dengan 147 orang, diikuti oleh "Pengatur TK I" (29 orang). Konsentrasi pangkat yang lebih tinggi (Pembina Utama Muda, Pembina, Penata) relatif sangat sedikit. Mayoritas tenaga kerja berada pada level operasional dan dasar, sejalan dengan temuan pendidikan (SMA) dan status kepegawaian (PPPK/Outsourcing), memperkuat fungsi dinas sebagai unit pelayanan teknis lapangan.

b) Standar Personil

Standar personil diperlukan sebagai pedoman untuk menetapkan persyaratan kompetensi dan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh karyawan dalam suatu organisasi. Mencakup kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas dengan efektif. Standar ini penting untuk memastikan bahwa setiap karyawan memiliki keterampilan yang diperlukan dan untuk menghindari kesalahan rekrutmen. Selain itu, standar personil juga berfungsi sebagai pedoman dalam proses sertifikasi kompetensi untuk memastikan bahwa proses sertifikasi dilakukan dengan kredibilitas tinggi dan diakui secara internasional. Di dalam Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan juga diperlukan Standar Personil agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Berikut perbandingan Standar Personil dengan Personil yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Tabel 2. 5
Aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

NO	APARATUR	KEBUTUHAN	TERSEDIA	PERSENTASE	KET
1	PEMADAM I	2941	277	9,4	
2	PEMADAM II	423	21	5,0	
3	PEMADAM III	128	3	2,3	
4	INSPEKTUR MUDA KEBAKARAN	11	0	0,00	
5	INSPEKTUR MADYA KEBAKARAN	4	0	0,00	
6	INSPEKTUR UTAMA KEBAKARAN	4	0	0,00	
7	PENYULUH MUDA KEBAKARAN	14	2	14,3	
8	INVESTIGATOR MUDA KEBAKARAN	12	0	0,00	
9	INVESTIGATOR MADYA KEBAKARAN	1	0	0,00	
10	INSTRUKTUR MUDA KEBAKARAN	13	0	0,00	
11	INSTRUKTUR MADYA KEBAKARAN	2	0	0,00	
12	MONTIR MOBIL KEBAKARAN	40	0	0,00	
13	CARAKA MOBIL KEBAKARAN	40	0	0,00	
14	OPERATOR KOMUNIKASI KEBAKARAN	40	0	0,00	
15	OPERATOR MOBIL KEBAKARAN	20	0	0,00	

Sumber: Sub Bagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian, 2025

Data yang disajikan menunjukkan kesenjangan yang sangat besar antara kebutuhan ideal dan jumlah aparatur yang saat ini tersedia di berbagai jabatan dalam dinas pemadam kebakaran. Secara keseluruhan, ketersediaan aparatur berada pada tingkat yang sangat kritis dan mengkhawatirkan, dengan sebagian besar posisi menunjukkan ketersediaan nol. Posisi ini mencakup posisi-posisi penting seperti Inspektur, Investigator, Instruktur, Montir Mobil

Kebakaran, Caraka Mobil Kebakaran, Operator Komunikasi Kebakaran, dan Operator Mobil Kebakaran. Ketiadaan personel di posisi-posisi ini mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan, investigasi, pelatihan, dukungan teknis (montir), logistik/operasional kendaraan, dan komunikasi darurat tidak berfungsi atau dijalankan oleh personel yang tidak sesuai/rangkap jabatan, yang dapat sangat mempengaruhi efektivitas operasional.

Data ini secara tegas menyimpulkan adanya krisis sumber daya manusia (SDM) yang mendalam di seluruh spektrum operasional pemadam kebakaran. Tingkat persentase ketersediaan yang hampir seluruhnya di bawah 10%, dan sebagian besar berada di 0,0%, menunjukkan bahwa kapasitas untuk merespons keadaan darurat secara efektif, melakukan pencegahan, dan investigasi sangat terhambat, sehingga perluya dilakukan rekrutmen besar-besaran dan cepat, dengan prioritas utama pada jabatan Pemadam I, II, III, serta mengisi posisi-posisi spesialis (Inspektur, Investigator, Instruktur, dan Operator Teknis) yang saat ini kosong.

c) Asset atau Modal

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan saat ini adalah sebagai berikut:

1) Tanah

Tabel 2. 6

Tanah Milik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Nama Barang	Luas Tanah		Kondisi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tanah untuk bangunan pos UPT Bencana di Kecamatan Loa Janan, status tanah milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	105	m ²	Baik	1

No	Nama Barang	Luas Tanah		Kondisi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Tanah bangunan kantor pemerintah EX. Dinas Pekerjaan Umum	220	m ²	Baik	1
3	Tanah bangunan kantor Pemerintah pembebasan lahan untuk perluasan kantor BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013	4.260	m ²	Baik	1
4	Tanah bangunan kantor pemerintah untuk bangunan pos UPT Bencana Di Kecamatan Samboja, Status Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	290	m ²	Baik	1

Sumber: Sub Bagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian, 2025

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki beberapa aset tanah penting yang digunakan untuk mendukung operasionalnya, khususnya dalam penanggulangan bencana. Secara keseluruhan, semua aset tanah yang tercatat berada dalam kondisi baik. Total keseluruhan luas tanah yang tercatat dari empat lokasi tersebut adalah 4.875 m², yang menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk fungsi pemadam kebakaran dan penyelamatan.

2) Peralatan, Mesin dan Kendaraan Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Tabel 2. 7
Peralatan, Mesin dan Kendaraan Kantor

No	Nama Barang	Spesifikasi	Kondisi	Jumlah
1	Pick Up	New Carry FD / Pick Up Hdc61t	Baik	1
2	Sepeda Motor	Honda ADV / MB0	Baik	2
3	Sepeda Motor	ADV / MB0	Baik	13
4	Mobil Ambulance	Suzuki / APV SGX MT	Baik	1
5	Mobil Pemadam Kebakaran	Hino / Hino Dutro 136 HDL	Baik	6
6	Mobil Pemadam Kebakaran	Isuzu / Isuzu Giga FVM 34	Baik	2
7	Mobil Pemadam Kebakaran	Hino / Dutro 136hdx	Baik	2
8	Mobil Pemadam Kebakaran	Hino / Dutro 136hdl	Baik	5
9	Mobil Pemadam Kebakaran	Hino / Dutro 136 Hdx 6,8 (Ch)	Baik	2
10	Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya (Dst)	Fin Komodo KD 250 X / Fin Komodo KD 250 X Konfigurasi Bpbd Model A	Baik	2
11	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya (Dst)	Viar	Baik	1
12	Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Penumpang Lainnya (Dst)	Yamaha / AD-5	Baik	1
13	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk Penumpang Lainnya (Dst)	Munja / 380	Baik	2

No	Nama Barang	Spesifikasi	Kondisi	Jumlah
14	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk Penumpang Lainnya (Dst)	-	Baik	8
15	Lemari Besi/Metal	Masterspace	Baik	1
16	Lemari Besi/Metal	Informa	Baik	8
17	Filing Cabinet Besi	Krisbow	Baik	1
18	Locker	Informa	Baik	20
19	Kursi Besi/Metal	Chitose	Baik	29
20	Meja Rapat		Baik	1
21	Kursi Rapat	-	Baik	8
22	Kursi Tamu	Informa	Baik	10
23	Sofa	-	Baik	1
24	A.C. Split	LG / H09TN4 UCAX2	Baik	4
25	Meja Kerja Pejabat Eselon II	-	Baik	2
26	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Informa	Baik	12
27	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Sieben Genki	Baik	33
28	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	-	Baik	1
29	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Krisbow	Baik	1
30	P.C Unit	Kinetic 354 / AOC Gaming	Baik	1
31	Lap Top	Asus / Tuf Gaming Fx507zc - I735b7g – O	Baik	1
32	Lap Top	Acer Nitro 5 / An515-85-91t4 Intel Ci9 - 12900h	Baik	6
33	Printer (Peralatan	Epson / LQ 310	Baik	9

No	Nama Barang	Spesifikasi	Kondisi	Jumlah
	Personal Komputer)			
34	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L5290	Baik	3
35	Alat Eksplorasi Topografi Lainnya Lainnya (Dst)	CZI / LP12	Baik	1
36	Alat Eksplorasi Topografi Lainnya Lainnya (Dst)	DJI / Matrice 30 T	Baik	1
37	Blower	Panasonic / FV-25TGU5	Baik	2
38	Peralatan Fitnes	Mascelboy	Baik	24
39	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	Olympia / SM 18	Baik	4
40	Lemari Besi/Metal	Frontline / Custom	Baik	1
41	Lemari Besi/Metal	Informa / Custom	Baik	11
42	Filing Cabinet Besi	Informa / Custom	Baik	1
43	CCTV - Camera Control Television Sistem	@Jhua / Smart Out Door	Baik	8
44	Mesin Cuci	Robin 4Tak / RPB-4T35	Baik	2
45	Lemari Es	Sharp / ES-FL1410MSX	Baik	2
46	Rice Cooker (Alat Dapur)	LG / 2 Pintu	Baik	1
47	Televisi	Oxone / OX-189	Baik	2
48	Televisi	LG / UHD SMART TV	Baik	1
49	Televisi	Sony / K-85S30	Baik	1
50	Sound Sistem	Sony / XR-75X90L	Baik	1
51	Sound Sistem	Samsung / UA60DU7000	Baik	2
52	Sound Sistem	BMB 12 Inch / CS-550	Baik	1

No	Nama Barang	Spesifikasi	Kondisi	Jumlah
		V		
53	Coffee Maker	Thunder / TH-PA500	Baik	1
54	Bracket Standing Peralatan	Whelen / TS200-N	Baik	1
55	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Latina / Altro-2	Baik	2
56	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Custom / Custom	Baik	3
57	Audio Mixing Stationer	Thunder / TM07-USB	Baik	1
58	Microphone/Wireless MIC	Wisdom / Ultra Q2	Baik	1
59	Camera Digital	Gopro / Kamera Gopro Hero 9 Black	Baik	4
60	Audio Converter	Custom / Custom	Baik	1
61	Alat Studio Lainnya	DBX / 166 XL	Baik	1
62	Handy Talky (HT)	Motorola / Mototrbo R70	Baik	21
63	Handy Talky (HT)	Motorola / Xir C2660	Baik	40
64	Handy Talky (HT)	Motorola / D828 Mobile Poc Radio	Baik	1
65	Switcher/Menara Antena Lainnya (Dst)	Motorola / Mototrbo SLR 5300	Baik	1
66	P.C Unit	Drager / SCBA	Baik	5
67	P.C Unit	UNI-T / UT-371	Baik	1
68	Lap Top	Chiba / Sarung Tangan APD	Baik	100
69	Lap Top	Acer / Veriton Z4 AIO Ci7	Baik	4
70	Lap Top	Asus / A3202WB	Baik	1
71	Lap Top	Asus / BG1408CV	Baik	7
72	Lap Top	Acer / Travelmate P414	Baik	3
73	Lap Top	Acer / AN515-58-91T4	Baik	1

No	Nama Barang	Spesifikasi	Kondisi	Jumlah
74	Lap Top	Acer / Swift X 14	Baik	1
75	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Asus / UX8406M	Baik	1
76	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Asus / A1404V	Baik	1
77	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Asus / UM3406H	Baik	2
78	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L11050	Baik	1
79	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L 6260	Baik	7
80	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Epson / LQ 310 24 PIN	Baik	1
81	Thermal Imaging Camera	Epson / L 5290	Baik	1
82	Alat Peraga Pelatihan Lainnya (Dst)	Epson / DS-140	Baik	1
83	Alat Peraga Pelatihan Lainnya (Dst)	Custom / Custom	Baik	1
84	Alat Peraga Pelatihan Lainnya (Dst)	Custom / DPR-303-FB & Manikin	Baik	2
85	Peralatan Fitnes	Custom / Custom	Baik	1
86	Alat Ukur Lain-Lainnya (Dst)	Total Fitnes / Climbing Stepper ZF 9700	Baik	2
87	Rak Kayu	Custom / Custom	Baik	1
88	Bracket Standing Peralatan	Custom / DPR-303-FB & Manikin	Baik	2
89	Digital Anemometer	Custom / Custom	Baik	1
90	Peralatan Fitnes	Total Fitnes / Climbing Stepper ZF 9700	Baik	2
91	Pompa Air	Yamamoto	Baik	3

No	Nama Barang	Spesifikasi	Kondisi	Jumlah
92	Pompa Portable	Yamamoto	Baik	3
93	Selang Air	Yamamoto	Baik	15
94	Mesin Kompresor	Bauer / T8000	Baik	1
95	Battery Charge	DJI / TB30	Baik	8
96	Battery Charge	DJI / BATERAI Case	Baik	1
97	Gergaji Chain Saw	Stihl / TS 410/420	Baik	1
98	Gergaji Chain Saw	Stihl / MS 720	Baik	1
99	Mesin Pompa Air PMK	Thohatsu / Ve1500w	Baik	5
100	Mesin Pompa Air PMK	Thohatsu / Ve500as	Baik	5
101	Mesin Pompa Air PMK	Yamamoto / Mesin Pompa Air 22hp	Baik	2
102	Alat Pemadam Kebakaran Lainnya	Custom	Baik	20
103	Alat Pemadam Kebakaran Lainnya	Drager / PSS 3000	Baik	3
104	Alat Pemadam Kebakaran Lainnya	Protek 520	Baik	6
105	Alat Pemadam Kebakaran Lainnya	Ziegler	Baik	44
106	Alat Pemadam Kebakaran Lainnya	Protek	Baik	2
107	Alat Pemadam Kebakaran Lainnya	Harmit / Custom	Baik	4
108	Senter Mini Standar Safety	Nitecore / MT21C	Baik	15
109	Senter Mini Standar Safety	Nitecore / TM28	Baik	2
110	Baju Tahan Api	Custom / PPE	Baik	28
111	Baju Anti Panas	-	Baik	20
111	Helmet	-	Baik	20

No	Nama Barang	Spesifikasi	Kondisi	Jumlah
2				
11 3	Sepatu Boot	-	Baik	20
11 4	Sarung Tangan (Tusa)	Petzl	Baik	20
11 5	Portable Generating Set	Firman / E5 Series	Baik	1
11 6	Selang Air	Tonata / Rubber	Baik	28
11 7	Selang Air	Thoni Herkules / Rubber	Baik	2
11 8	Mobil Pemadam Kebakaran	Hino / CWS 14.000 Liter Water Single Cabin	Baik	1
11 9	Mobil Pemadam Kebakaran	Hino / CWS 14.000 Liter Single Cabin	Baik	1
12 0	Mobil Pemadam Kebakaran	Hino / Dutro 136 HD 4x2 Euro 4	Baik	1
12 1	Mobil Pemadam Kebakaran	Hino / 300 Series/136 HD	Baik	1
12 2	Speed Boat / Motor Tempel	Yamaha / 61 RK	Baik	2
12 3	Speed Boat / Motor Tempel	Hidea / HD 25 FHL	Baik	2
12 4	Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Penumpang Lainnya (Dst)	Ocean / 380	Baik	2
12 5	Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus Lainnya (Dst)	Custom / Boat	Baik	2
12 6	Mesin Kompresor	Custom / GFM16-1	Baik	1
12	Gergaji Chain Saw	Sthil / 070	Baik	4

No	Nama Barang	Spesifikasi	Kondisi	Jumlah
7				
128	Gergaji Chain Saw	Stihl / MS 170	Baik	5
129	Gergaji Chain Saw	Stihl / MS 382	Baik	3
130	Mesin Pompa Air PMK	Yamamoto / YMT GX 460 22HP	Baik	28
131	Mesin Pompa Air PMK	Honda / GXV 390	Baik	2
132	Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)	Benetech / GM1356	Baik	1
133	Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)	Custome / RS485	Baik	1
134	Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)	ETCR Electronics / ETCR-6450	Baik	1
135	Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)	TASI / TA8133	Baik	1
136	Global Positioning Sistem	Garmin / Rubber Silicone	Baik	4
137	Alat Ukur Universal Lainnya (Dst)	Wipro / MLD-100	Baik	1
138	Alat Ukur Lainnya Lainnya (Dst)	Shilla / SL-PT-111	Baik	1
139	Topeng (Masker) Oksigen	Draeger / FPS 7000	Baik	5
140	Alat Pemadam Kebakaran Lainnya	Rotex / Powder	Baik	30
141	Alat Pemadam Kebakaran Lainnya	Tonata / NZL_01	Baik	28
142	Alat Pemadam Kebakaran Lainnya	Blitzfire / 2,5 Inch	Baik	2

No	Nama Barang	Spesifikasi	Kondisi	Jumlah
14 3	Alat Pemadam Kebakaran Lainnya	Custom / Custom	Baik	10
14 4	Alat Pemadam Kebakaran Lainnya	SOLO / 460-001	Baik	1
14 5	Alat Pemadam Kebakaran Lainnya	Custome / Gun	Baik	9
14 6	Alat Pemadam Kebakaran Lainnya	Gosave 16 Bar / FH Red	Baik	25
14 7	Alat Pemadam Kebakaran Lainnya	Ziegler / Gun	Baik	8
14 8	Alat Pemadam Kebakaran Lainnya	AWG / 2,5 Inch	Baik	6

Sumber: Sub Bagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian, 2025

Inventarisasi aset Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan kepemilikan beragam peralatan dan mesin yang vital untuk mendukung tugas operasional dan administrasi kantor. Secara umum, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sudah memiliki dukungan aset yang cukup lengkap, mulai dari armada mobil dan motor yang siap digunakan, hingga peralatan kantor modern dan peralatan teknik dasar, dengan mayoritas aset berada dalam kondisi Baik.

3) Gedung dan Bangunan

Tabel 2. 8

Gedung dan Bangunan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Uraian	Volume		Kondisi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga lain-lain (dst) a. Pos UPT Bencana di Kecamatan Loa Janan, status tanah milik Pemerintah Kabupaten	311	M2	Baik	1

No	Uraian	Volume		Kondisi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kutai Kartanegara. b. EX. Dinas Pekerjaan Umum c. Pembebasan lahan untuk perluasan kantor BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2013				
2	Bangunan Gudang Tertutup Permanen a. Jalan Ap Mangkunegoro Kel. Timbau Kec. Tenggarong (Belakang Kantor BPBD Kab. Kukar)	144	M2	Baik	1
3	Gedung Garasi/ Pool Semi Permanen a. Jalan A.P Mangkunegara Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. b. Samping Kanan Kantor BPBD Jalan AP. Mangkunegoro Kel. Timbau Tenggarong	213.72	M2	Baik	1
4	Pagar Permanen a. Desa Leka Kecamatan Muara Muntai	150	M	Baik	1
5	Bangunan Tempat Parkir a. Jalan AP. Mangkunegoro No. 03 Kel. Timbau Kec. Tenggarong	978	M2	Baik	1
6	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	24	M2	Baik	1

No	Uraian	Volume		Kondisi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	a. Jalan AP. Mangkunegoro No. 03 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kukar				
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen a. Jalan A.P Mangkunegara Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. b. Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab.Kutai Kartanegara c. Jalan A.P Mangkunegara Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. d. Kecamatan Kota Bangun Dan Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara e. Kecamatan Tenggarong Seberang f. Kecamatan Loa Kulu g. Kecamatan Marang Kayu h. Kecamatan Muara Jawa i. Kecamatan Sanga Sanga j. Kecamatan Sebulu k. Jalan Ap. Mangkunegoro No. 03 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kukar	48	M2	Baik	1
8	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	18	M2	Baik	1

No	Uraian	Volume		Kondisi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	a. Jalan AP. Mangkunegoro NO. 03 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong (kantor BPBD Kab. Kukar)				

Sumber: Sub Bagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian, 2025

Aset gedung dan bangunan yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan cakupan kepemilikan yang beragam, mulai dari fasilitas utama kantor hingga pos-pos layanan di berbagai kecamatan. Sebagian besar aset yang tercatat dalam tabel di atas berada dalam kondisi baik. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan distribusi aset bangunan yang mendukung fungsi administrasi (Kantor, Gudang) dan fungsi operasional kebencanaan (Pos UPT) di berbagai wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

4) Aset Tak Berwujud

Tabel 2. 9

Aset Tak Berwujud Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Uraian	Kondisi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Aplikasi SIGAP	Baik	1

Sumber: Sub Bagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian, 2025

Aplikasi SIGAP (Sistem Informasi Gerak Cepat dan Tepat) merujuk pada sebuah solusi digital yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mempercepat layanan darurat, khususnya yang berhubungan dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Fungsi utamanya adalah memastikan pelaporan lokasi bencana secara akurat, cepat, dan tepat. Fitur utama pada aplikasi ini antara lain, Lapor Kebakaran, Lapor Non Kebakaran, dan Telepon Darurat. Dengan adanya aplikasi SIGAP, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat senantiasa siap melayani masyarakat dalam penanganan bencana, baik kebakaran maupun non kebakaran.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam menjalankan Urusan Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya Sub Urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah diukur melalui Indikator *Cakupan Penyebaran Informasi dan “Edukasi Rawan Kebakaran”*, *Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran* serta Cakupan Sarana dan Prasarana Penyelamatan dan Kebakaran sesuai Standar dalam kondisi baik. Adapun capaian indikator kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 10

Pencapaian Kinerja Pelayanan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian Tahun ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		Persen		n.a	n.a	100	100	n.a	n.a	91.49	87.72	n.a	n.a	91.00	87.72
2	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran		Menit		n.a	n.a	15	15	n.a	n.a	11.04	11.2	n.a	n.a	73.6	74.67

Sumber: Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, 2025

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan juga mempunyai Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Urusan Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang dimana Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut terdapat Capaian Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran. Pada capaian pelayanan tersebut terdapat Jumlah yang harus dilayani (Persentase Pencapaian Layanan) serta Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus dilayani/ dipenuhi. Di Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus dilayani/ dipenuhi terdapat 6 indikator sebagai berikut :

1. Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi;
2. Pemenuhan Standar Operasional Prosedur Penanganan Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi;
3. Pemenuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
4. Pemenuhan Standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/ Sumber Daya Manusia (SDM);
5. Pemenuhan Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga Negara yang menjadi korban kebakaran; dan
6. Pemenuhan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga Negara yang terdampak kebakaran.

Adapun Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 11

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian Tahun ke-			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	n.a	n.a	100	100	n.a	n.a	95.16	100	n.a	n.a	95.16	100

Sumber: Aplikasi Bepaddah Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, 2025

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Berdasarkan Permendagri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota urusan kebakaran adalah sub urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan kebakaran diwadahi dalam perangkat daerah yang berbentuk dinas. Oleh karena itu, sejak akhir 2022 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara membentuk perangkat daerah mandiri untuk melaksanakan pelayanan dasar bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dilaksanakan oleh perangkat daerah mandiri. Pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/ Kota, maka Jenis Layanan yang terdapat di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari :

- a) Layanan respon cepat (*Response Time*) penanggulangan kejadian kebakaran.

Layanan response time untuk penanggulangan kebakaran adalah waktu yang diukur sejak laporan diterima hingga petugas siap memadamkan api, yang bertujuan untuk meminimalkan kerugian. Standar umum di Indonesia adalah 15 menit, yang dapat dirinci seperti berikut:

- 1) 5 menit untuk interpretasi laporan, penyiapan, dan penyiagaan;
- 2) 5 menit untuk waktu tempuh ke lokasi; dan
- 3) 5 menit untuk gelar peralatan dan siap operasi.

Upaya untuk meningkatkan *Response Time* antara lain:

- 1) Penempatan pos: Membangun pos pemadam kebakaran di daerah rawan untuk memperpendek jarak tempuh;
- 2) Pemberdayaan masyarakat: Melibatkan relawan pemadam kebakaran (BALAKAR) untuk memberikan bantuan awal

sebelum tim pemadam profesional tiba, terutama di area sulit dijangkau;

- 3) Pemeriksaan dan perawatan: Rutin memeriksa dan merawat peralatan pemadam kebakaran agar selalu siap digunakan; dan
 - 4) Inovasi teknologi: Memanfaatkan teknologi seperti pelaporan berbasis aplikasi, pemantauan real-time, dan sistem notifikasi otomatis untuk mempercepat proses.
- b) Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran; Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) untuk menanggapi insiden kebakaran, meliputi tindakan pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda, serta pencegahan dengan sosialisasi dan simulasi. Layanan ini juga mencakup penyediaan data dan inspeksi terkait kebakaran yaitu :
- 1) Pemadaman api: Menangani kebakaran pada bangunan, hutan, kendaraan, atau area lainnya untuk memadamkan api;
 - 2) Penyelamatan dan evakuasi: Menyelamatkan jiwa manusia dan hewan serta mengevakuasi harta benda yang terancam oleh kebakaran atau bencana lain;
 - 3) Pencegahan kebakaran: Memberikan sosialisasi, melakukan latihan simulasi evakuasi, memeriksa dan menguji bangunan, serta memberikan konsultasi teknis mengenai keselamatan kebakaran;
 - 4) Pengendalian operasi penanggulangan bencana: Merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan teknis untuk penanggulangan bencana, termasuk kebakaran;
 - 5) Pemberdayaan masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui pemberdayaan relawan kebakaran; dan
 - 6) Inspeksi dan investigasi: Melakukan pendataan, inspeksi, dan investigasi terhadap insiden kebakaran untuk mengetahui penyebabnya dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
- c) Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi; Kegiatan yang dilakukan oleh Pemadam Kebakaran (Damkar) untuk mengevakuasi korban kebakaran atau non-kebakaran, termasuk operasi penyelamatan dalam kondisi berbahaya. Layanan ini

meliputi respon cepat (*responses time*), pencarian, pertolongan, dan penyediaan sarana serta prasarana penyelamatan. Dalam situasi darurat, masyarakat juga dapat menghubungi instansi lain seperti BPBD, TNI, Polri, SAR, atau PMI untuk meminta bantuan, layanan tersebut adalah :

- 1) Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi: Meliputi evakuasi korban kebakaran dan non-kebakaran, seperti hewan, serta penyelamatan pada kondisi yang membahayakan manusia;
 - 2) Respon cepat (*response time*): Memastikan penanganan yang cepat terhadap situasi darurat;
 - 3) Pencarian dan pertolongan: Melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban yang terjebak atau membutuhkan bantuan;
 - 4) Penanganan non-kebakaran: Meliputi operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi berbahaya seperti bencana alam, kecelakaan, atau insiden lainnya;
 - 5) Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana: Menyediakan peralatan yang diperlukan untuk penyelamatan dan evakuasi; dan
 - 6) System komunikasi dan informasi: Menyelenggarakan system komunikasi untuk koordinasi dan informasi selama operasi berlangsung.
- d) Layanan pemberdayaan masyarakat / relawan kebakaran; Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, yang diwujudkan melalui pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR). Kegiatan ini mencakup sosialisasi, edukasi, pelatihan dasar pemadaman ringan, dan pertolongan pertama, dengan tujuan menjadikan masyarakat garda terdepan dalam penanganan awal sebelum petugas damkar tiba. Tujuan pemberdayaan masyarakat / relawan kebakaran antara lain:
- 1) Meningkatkan kesiapsiagaan: Mempersiapkan masyarakat di Tingkat RT, RW, desa, atau kelurahan agar lebih sigap dalam menghadapi kebakaran;

- 2) Meningkatkan keterampilan: Melatih anggota relawan dengan pengetahuan dan kemampuan dasar penanganan kebakaran seperti penggunaan APAR dan teknis evakuasi darurat;
 - 3) Menumbuhkan kesadaran: Membangun kesadaran dan pemahaman yang lebih mendalam di masyarakat mengenai risiko, penyebab, dan cara mencegah kebakaran;
 - 4) Menjadi agen edukasi: Membentuk relawan menjadi agen penyebar informasi dan kesadaran keselamatan kebakaran di lingkungan mereka; dan
 - 5) Mempercepat respon: Memastikan penanganan awal kebakaran dapat dilakukan lebih cepat melalui relawan, sehingga memperkecil kerugian.
- e) Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran. Merupakan salah satu fungsi dari dinas pemadaman kebakaran (damkar) untuk mendokumentasikan kejadian kebakaran, memeriksa kondisi lokasi setelah api padam, dan menentukan penyebab terjadinya kebakaran. Layanan ini bertujuan untuk mengumpulkan data, memastikan keamanan, dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penyebab serta cara mencegah kebakaran di masa depan. Cara melakukan pendataan pasca kebakaran yaitu dengan mencatat informasi detail tentang insiden, seperti lokasi, waktu, objek yang terbakar, dan korban jiwa atau luka. Sedangkan, untuk melakukan inspeksi pasca kebakaran adalah dengan pemeriksaan teknis, yaitu memeriksa kondisi bangunan atau area yang terbakar termasuk sistem proteksi kebakaran yang ada untuk memastikan kelayakan dan keamanannya. Pada investigasi pasca kebakaran cara menentukan penyebabnya adalah dengan melakukan penyelidikan untuk mencari tahu penyebab utama terjadinya kebakaran (misalnya, korsleting listrik, kelalaian, atau lainnya).

Kelompok sasaran layanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan seluruh pihak yang menerima manfaat dari penyelenggaraan pelayanan sub-urusan kebakaran, penyelamatan, dan pencegahan kebakaran. Penetapan kelompok sasaran ini berpedoman pada mandat pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Standar

Pelayanan Minimal (SPM) serta tujuan strategis penyelamatan jiwa dan perlindungan aset masyarakat.

Kelompok sasaran ini meliputi seluruh masyarakat yang berada dalam jangkauan pelayanan Damkarmatan, termasuk individu, keluarga, kelompok masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha, serta kawasan rawan kebakaran. Renstra Damkarmatan menegaskan bahwa target layanan pemadaman kebakaran, penyelamatan korban, dan edukasi pencegahan kebakaran ditetapkan sebesar 100% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa secara prinsip, seluruh lapisan masyarakat menjadi penerima manfaat utama dari pelayanan Damkarmatan.

Kelompok masyarakat yang tinggal pada wilayah rawan kebakaran, termasuk kawasan permukiman padat, fasilitas umum, objek vital, kegiatan industri, serta area dengan tingkat risiko tinggi, juga menjadi sasaran prioritas program pencegahan dan edukasi. Renstra mencatat bahwa edukasi rawan kebakaran ditargetkan mencapai 100% setiap tahun, sehingga sasaran layanan tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga preventif.

Di sisi lain, kelompok sasaran internal, yaitu personel Damkarmatan (Damkar Matang), juga termasuk dalam lingkup sasaran layanan. Mereka menjadi sasaran program peningkatan kapasitas melalui pelatihan dasar, pelatihan teknis, sertifikasi, dan pembinaan berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam penahapan Renstra. Peningkatan kompetensi ini bertujuan untuk memastikan kesiapan aparatur dalam memberikan pelayanan kebakaran dan penyelamatan secara profesional.

Dengan demikian, kelompok sasaran layanan Damkarmatan dapat dirangkum sebagai berikut:

- 1) Masyarakat umum di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, termasuk permukiman, fasilitas umum, dan kawasan industri;
- 2) Masyarakat terdampak kejadian darurat, baik kebakaran maupun non-kebakaran, yang membutuhkan tindakan penyelamatan dan evakuasi;
- 3) Kelompok masyarakat rawan kebakaran, yang menjadi sasaran program edukasi, sosialisasi, dan pencegahan kebakaran;

- 4) Dunia usaha, lembaga pendidikan, dan komunitas masyarakat, sebagai penerima manfaat pembinaan kesiapsiagaan dan peningkatan kapasitas pencegahan kebakaran; dan
- 5) Personel Damkar Matang, sebagai sasaran pengembangan kompetensi aparatur guna meningkatkan kualitas layanan.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah

Mitra perangkat daerah merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pelayanan kebakaran dan penyelamatan. Renstra Damkarmatan menjelaskan bahwa keberhasilan layanan sangat bergantung pada sinergi lintas sektor, baik dengan perangkat daerah internal Kutai Kartanegara, dunia usaha, lembaga pendidikan, maupun pemerintah daerah lain melalui kerja sama formal. Hal ini terlihat pada penahapan Renstra halaman 3–4 yang menekankan perlunya penguatan kemitraan dalam edukasi kebakaran, penyediaan sarana prasarana, hingga peningkatan kualitas pelayanan.

a) Mitra Internal Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Mitra internal yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan layanan kebakaran meliputi:

- 1) BPBD Kutai Kartanegara – terlibat dalam penanganan bencana kebakaran berskala besar, serta menjadi lokasi komando bersama sebagaimana tercantum dalam PKS Bontang–Kukar.
- 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman / Dinas Pekerjaan Umum – terlibat dalam penyediaan hidran dan infrastruktur pendukung pelayanan kebakaran.
- 3) Dinas Kominfo – mendukung penyediaan sistem informasi kebakaran serta penyebaran informasi peringatan dini kepada masyarakat.
- 4) Dinas Pendidikan dan Sekolah – berperan dalam penyelenggaraan edukasi pencegahan kebakaran kepada peserta didik dan lingkungan pendidikan.
- 5) Dunia Usaha dan Komunitas Masyarakat – menjadi mitra dalam pembinaan kesiapsiagaan, pelatihan dasar pencegahan kebakaran, serta pembangunan budaya sadar bahaya kebakaran.

b) Mitra Lintas Daerah dan Kerja Sama Formal

Data kerja sama yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan Damkarmatan diperoleh dari PKS yang telah ditandatangani dengan pemerintah daerah sekitar.

1) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bontang

Kerja sama Bontang–Kukar bertujuan meningkatkan keterpaduan penanganan kebakaran di wilayah perbatasan. Ruang lingkupnya meliputi:

- a. Operasi pemadaman dan penyelamatan bersama.
- b. Penyusunan dan penerapan SOP gabungan.
- c. Pelatihan teknis dan pengenalan peralatan.
- d. Penyediaan suplai air pemadaman.
- e. Penguatan sistem komunikasi terpadu.
- f. Pertukaran informasi kejadian kebakaran.
- g. Evaluasi berkala.

2) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU)

Kerja sama PPU–Kukar bertujuan meningkatkan kemampuan respons kebakaran di wilayah perbatasan. Ruang lingkupnya meliputi:

- a. Penanganan bersama kejadian kebakaran di wilayah perbatasan.
- b. Sistem komando operasi bersama.
- c. Koordinasi dan pertukaran informasi mengenai potensi bahaya kebakaran.
- d. Operasi gabungan.
- e. Evaluasi bersama setiap semester.
- f. Bantuan armada dan personel sesuai kebutuhan dan permintaan resmi.

2.1.6 Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggungjawab Perangkat Daerah

Kerja sama daerah merupakan bagian strategis dari penyelenggaraan sub-urusan kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Seluruh bentuk kerja sama ini bersumber dari dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang secara resmi ditandatangani dengan pemerintah daerah lain dan berlaku dalam periode 2023–2028. Kerja sama tersebut ditujukan

untuk memperkuat kapasitas respon, koordinasi lintas wilayah, dukungan sumber daya, serta memperluas jangkauan layanan Damkarmatan.

a) Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Kota Bontang

Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Kota Bontang merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama tahun 2022 yang berfokus pada peningkatan efektivitas penanggulangan kebakaran di wilayah perbatasan. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Kota Bontang masing-masing Nomor B-2515 /KS/ KSDN / 134.6-13 / 09 / 2022 dengan Nomor 134.4.01 / 105 / PEM.A Nomor 134.4.01 / 105 / PEM.A Tentang Kerjasama Pembangunan Antar Daerah. Pada hari Rabu Tanggal Tujuh September Dua Ribu Dua Puluh Dua (07 - 09 - 2022). Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- 1) Operasi pemadaman dan penyelamatan bersama, terutama di wilayah perbatasan seperti Kecamatan Marang Kayu dan Bontang Lestari.
- 2) Penyusunan dan penerapan SOP gabungan, mencakup prosedur operasi, keselamatan personel, penempatan unit Damkar, serta mekanisme gelar peralatan.
- 3) Pelatihan teknis dan pengenalan peralatan bersama, guna meningkatkan kompetensi personel dari kedua pemerintah daerah.
- 4) Penyediaan suplai air pemadaman, melalui pemanfaatan sumber air bersama dan hidran terdekat pada wilayah perbatasan.
- 5) Penguatan sistem komunikasi terpadu, termasuk komunikasi radio, laporan kejadian, dan penyebaran informasi bahaya kebakaran.
- 6) Pertukaran data dan informasi kejadian kebakaran, termasuk potensi bahaya pada wilayah perbatasan.
- 7) Evaluasi berkala, dilaksanakan minimal sekali dalam satu tahun oleh kedua pihak.

b) Kerja Sama Daerah dengan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU)

Kerja sama antara Damkarmatan Kukar dan Damkar PPU didasarkan pada Kesepakatan Bersama tahun 2020 dan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penanggulangan kebakaran di daerah perbatasan Kukar-PPU. Perjanjian Kerjasama Damkarmatan Kukar dan Damkar PPU Nomor B.2282/KS/KSDN/134.6-22/09/2020 dengan Nomor 197/743/TU-PIMP/14/Pem. Tentang Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah. Pada Hari Senin Tanggal Tiga Agustus Tahun Duari Dua Puluh (03 - 08 - 2020). Ruang lingkup kerja sama meliputi:

- 1) Penanganan bersama kejadian kebakaran, khususnya kejadian yang berada dalam jangkauan kedua daerah.
- 2) Sistem komando operasi gabungan, yang disesuaikan dengan lokasi kejadian dan kewenangan wilayah masing-masing.
- 3) Koordinasi dan pertukaran informasi, meliputi potensi bahaya kebakaran, laporan kejadian, dan status operasi.
- 4) Operasi gabungan, apabila terjadi kejadian besar yang membutuhkan dukungan lintas daerah.
- 5) Evaluasi bersama setiap semester, untuk menilai efektivitas pelaksanaan kerja sama.
- 6) Bantuan armada dan personel, diberikan berdasarkan kebutuhan operasi dan permintaan resmi dari pemerintah daerah terkait.

Kerja sama daerah ini berlangsung selama lima tahun dan dapat diperpanjang melalui mekanisme kesepakatan bersama. Bentuk kerja sama dengan Kota Bontang maupun Kabupaten PPU merupakan bagian penting dari penguatan sistem penanggulangan kebakaran di wilayah perbatasan, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan standar pelayanan dasar Damkarmatan Kabupaten Kutai Kartanegara.

c) Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat (Kubar)

Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat merupakan bentuk kolaborasi untuk memperkuat penyelenggaraan ketertiban umum,

perlindungan masyarakat, serta penanggulangan kebakaran di wilayah yang berbatasan langsung maupun memiliki potensi risiko bencana serupa. Perjanjian kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat masing-masing Nomor B-13-1/KS/KSDN/134.6/31/05/22 dengan Nomor 130.13/516/KJS.TU.P/II/2022 Tentang Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Pada Hari Senin Tanggal Tujuh Bulan Februari Dua Ribu Dua Puluh Dua (07 -02 – 2022). Ruang Lingkup Kerjasamanya:

- 1) Persiapan pendahuluan meliputi pengenalan Wilayah Perbatasan, pengenalan alat dan teknologi PARA PIHAK;
- 2) Penyusunan dan pengenalan Standar Operasional Prosedur bersama;
- 3) Pelatihan bersama pengulangan kebakaran dan penyelamatan;
- 4) Persiapan penataan dan pengoperasian meliputi mekanisme informasi laporan kejadian *Response Time* (waktu tanggap) dan pelatihan bersama pemadaman kebakaran;
- 5) Pelaksanaan penataan dan pengoperasian meliputi operasi bersama wilayah operasional lintas batas, penanggulangan bersama kejadian kebakaran, suplai air bersama dan penempatan mobil pemadam kebakaran dengan pos-pos yang mudah dijangkau di wilayah perbatasan; dan
- 6) Evaluasi Kegiatan.

d) Kerja Sama dengan Pemerintah Kota Balikpapan

Kerja sama antara Damkarmatan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Kota Balikpapan bertujuan meningkatkan efektivitas penanggulangan kebakaran di wilayah perbatasan serta memperkuat dukungan sumber daya pada kejadian besar. Perjanjian Kerjasama antara Damkarmatan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Kota Balikpapan Nomor P.1023/DAMKARMATAN-UMTALPEG/000.4.7.2/11/2023 dengan Nomor 851/1089/BPBD Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27-11-2023). Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini berada di wilayah perbatasan antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan meliputi:

- 1) Cakupan wilayah perbatasan PIHAK KESATU, berada diwilayah Kecamatan Samboja Barat, yaitu:
 - a. Kelurahan Salok Api Laut
 - b. Kelurahan Salok Api Darat
 - c. Kelurahan Karya Merdeka
- 2) Cakupan wilayah perbatasan PIHAK KEDUA, berada diwilayah
 - a. Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara
 - b. Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat
 - c. Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur

Apabila Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah berdin berjalan dan Kecamatan Samboja Barat bergabung dengan IKN, maka ruang lingkupnya disesuaikan dengan wilayah perbatasan yang lainnya, Pada saat operasi Penyelenggaraan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan di lokasi kejadian, PARA PIHAK harus saling menghargai, menghormati dan bersinergi sesama petugas Bersama-sama melaksanakan kegiatan pemadaman kebakaran dan dengan jarak jangkauan sejauh 5 Km dan perbatasan PARA penyelamatan PIHAK PIHAK yang dibantu operasi Penyelenggaraan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan harus memberikan informasi tentang akses jalan dan sumber air terdekat, PARA PIHAK saling menginformasikan Frekuensi Radio Komunikasi yang digunakan untuk kepentingan Penyelenggaraan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan di lokasi kejadian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Ada beberapa Permasalahan Pelayanan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yaitu sebagai berikut:

1. Belum terpenuhinya bangunan pos sektor dan peralatan pemadam kebakaran pada setiap kecamatan. Penyebabnya antara lain:
 - 1) Kurangnya Infrastruktur dan Aksesibilitas.
Banyak kecamatan yang memiliki lokasi terpencil atau sulit dijangkau. Hal ini mempersulit pembangunan bangunan pos sektor

yang dapat berfungsi dengan optimal. Dampaknya kebakaran yang terjadi di daerah-daerah tersebut sulit dijangkau oleh petugas pemadam kebakaran, karena minimnya fasilitas dan sarana transportasi. Kecepatan dalam penanganan kebakaran sangat tergantung pada kedekatan pos sektor dengan lokasi kejadian.

2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kekurangan personil yang terlatih dan terampil dalam menangani kebakaran menjadi masalah besar. Beberapa kecamatan belum memiliki cukup jumlah petugas yang memiliki pelatihan khusus pemadam kebakaran, dan pelatihan yang tersedia mungkin terbatas. Ketidakmampuan petugas dalam menangani kebakaran dengan efektif dapat memperburuk dampak dari kebakaran, bahkan jika peralatan sudah tersedia.

3) Kurangnya Koordinasi dan Keterpaduan Antar Instansi

Terkadang, kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah, instansi terkait (seperti BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan), dan masyarakat menyebabkan terbengkalainya pembangunan fasilitas pemadam kebakaran yang seharusnya bisa disinergikan. Pembagian tanggung jawab yang kurang jelas antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan kebakaran juga memperlambat pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan peralatan.

4) Peralatan Pemadaman Kebakaran yang Ketinggalan Zaman

Tidak semua kecamatan memiliki peralatan pemadam kebakaran yang modern atau dalam kondisi yang baik. Banyak peralatan yang sudah usang dan tidak berfungsi maksimal. Penggunaan peralatan yang tidak optimal dapat memperburuk situasi kebakaran, bahkan mengancam keselamatan petugas pemadam kebakaran dan masyarakat. Selain itu, peralatan yang tidak memadai dapat memperlambat waktu tanggap darurat.

5) Pertumbuhan Penduduk dan Pemukiman yang Cepat

Pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat di beberapa kecamatan, terutama di kawasan urban dan sub-urban, sering kali

tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur kebakaran yang memadai. Hal ini menyebabkan pos sektor pemadam kebakaran tidak dapat melayani seluruh wilayah dengan baik. Pos sektor yang tidak merata di seluruh kecamatan akan menyebabkan keterlambatan dalam penanganan kebakaran, yang dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar.

6) Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Masyarakat yang kurang memahami pentingnya keberadaan pos sektor dan peralatan pemadam kebakaran sering kali mengabaikan atau tidak mendorong pembangunan fasilitas tersebut. Kurangnya dorongan dari masyarakat dapat memperlambat pencapaian tujuan dalam membangun sistem pemadam kebakaran yang lebih baik dan merata di seluruh kecamatan.

7) Regulasi dan Kebijakan yang Tidak Mendukung

Beberapa daerah mungkin belum memiliki regulasi atau kebijakan yang jelas dan mendukung pembangunan pos sektor atau pengadaan peralatan pemadam kebakaran di setiap kecamatan. Ketidakjelasan ini dapat menghambat pelaksanaan yang efektif di lapangan. Tanpa kebijakan yang kuat, prioritas pengembangan infrastruktur kebakaran bisa terabaikan, menyebabkan kesenjangan dalam penyediaan fasilitas tersebut.

2. Belum terpenuhinya Sarana dan Prasarana pada Kelompok Relawan Pemadam Kebakaran. Hal ini menjadi hambatan besar dalam menciptakan sistem penanggulangan kebakaran yang cepat, efisien, dan aman di tingkat masyarakat. Permasalahan ini bersifat struktural (anggaran, kebijakan, koordinasi) dan teknis (peralatan, pelatihan, manajemen). Penyebabnya antara lain:

1) Keterbatasan Peralatan Operasional

Banyak kelompok relawan pemadam kebakaran belum memiliki peralatan dasar seperti selang, pompa air portabel, pakaian pelindung (APD), tabung pemadam api ringan (APAR), dan kendaraan operasional. Hal ini dapat menurunkan efektivitas dan kecepatan relawan dalam memadamkan api, meningkatkan risiko keselamatan bagi relawan karena tidak dilengkapi alat pelindung

diri yang memadai, kebakaran kecil bisa berkembang menjadi besar karena keterbatasan peralatan penanganan awal.

2) Fasilitas Pendukung yang Belum Memadai

Kelompok relawan sering tidak memiliki posko, gudang penyimpanan alat, atau tempat pelatihan khusus. Hal ini dapat menyebabkan peralatan cepat rusak, koordinasi dan kesiapsiagaan menurun karena tidak ada tempat berkumpul atau sistem komunikasi terpusat, sehingga relawan kesulitan mengatur logistik dan manajemen peralatan saat terjadi kebakaran.

3) Keterbatasan Sumber Daya Keuangan

Kelompok relawan umumnya bergantung pada bantuan pemerintah daerah atau donasi masyarakat, yang sering tidak mencukupi. Dampaknya banyak kelompok relawan menggunakan peralatan seadanya atau hasil swadaya yang tidak memenuhi standar keselamatan.

4) Kurangnya Pelatihan Teknis dan Standarisasi

Belum semua relawan mendapatkan pelatihan resmi tentang penggunaan peralatan, teknik pemadaman, serta keselamatan diri. Dampak dari hal ini antara lain, penggunaan sarana dan prasarana tidak optimal atau bahkan berisiko menimbulkan kecelakaan, tidak ada standar operasional yang seragam antar kelompok relawan, sehingga koordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran sering tidak sinkron karena perbedaan pemahaman teknis.

5) Minimnya Dukungan dan Koordinasi dari Pemerintah

Belum semua daerah memiliki kebijakan atau program khusus yang memperkuat kapasitas sarana dan prasarana kelompok relawan. Sehingga relawan bekerja tanpa dukungan logistik yang memadai dari pemerintah daerah.

6) Kondisi Geografis dan Akses Lokasi

Beberapa kelompok relawan berada di daerah terpencil atau padat penduduk, dengan akses jalan sempit yang sulit dijangkau

kendaraan pemadam. Hal ini dapat menyebabkan peralatan standar (seperti mobil tangki) tidak bisa digunakan di wilayah tersebut, sehingga relawan terpaksa menggunakan alat manual yang kurang efektif.

7) Kurangnya Sistem Komunikasi dan Informasi

Keterbatasan alat komunikasi (HT, radio, atau aplikasi koordinasi digital) menyulitkan koordinasi antarrelawan dan dengan Dinas Damkar. Sehingga respon terhadap laporan kebakaran menjadi lambat.

8) Lemahnya Pemeliharaan dan Manajemen Peralatan

Tidak ada sistem pemeliharaan rutin untuk sarana dan prasarana yang dimiliki relawan. Menyebabkan banyak alat rusak atau tidak layak pakai ketika dibutuhkan.

9) Kurangnya Kesadaran dan Dukungan Masyarakat

Sebagian masyarakat belum memahami pentingnya peran kelompok relawan dan enggan terlibat atau mendukung kegiatan mereka. Hal ini menyebabkan sulitnya mendapatkan dukungan logistic dan sumber daya dari lingkungan sekitar.

3. Belum terpenuhinya Sumber Daya Manusia atau Personil pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Permasalahan ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:

1) Kekurangan Jumlah Personil

Banyak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmatan) di daerah yang belum memiliki jumlah personil sesuai dengan standar minimal pelayanan berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah. Idealnya, 1 regu terdiri dari 9–10 orang untuk setiap unit kendaraan, namun banyak daerah yang hanya memiliki sebagian kecil dari kebutuhan tersebut.

2) Ketimpangan Distribusi Personil

Personil Damkar sering terkonsentrasi di pusat kota atau ibu kota kabupaten, sedangkan kecamatan atau daerah pinggiran minim petugas. Hal ini dapat menyebabkan penanganan kebakaran di daerah pinggiran atau pedesaan menjadi lambat.

3) Keterbatasan Kompetensi dan Keterampilan Teknis

Tidak semua personil telah mengikuti pelatihan teknis sesuai standar nasional seperti Diklat Pemadam Kebakaran Tingkat I, II, dan III atau pelatihan penyelamatan (rescue).

4) Terbatasnya Tenaga Ahli dan Spesialis

Sebagian besar SDM Damkar masih didominasi oleh tenaga pelaksana lapangan. Sementara tenaga ahli seperti instruktur pelatihan, teknisi peralatan, perencana strategi mitigasi kebakaran, dan analisis risiko masih sangat terbatas.

5) Keterbatasan Anggaran untuk Pengembangan SDM

Pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan kompetensi memerlukan biaya besar, sementara alokasi anggaran sering kali minim dan difokuskan hanya pada operasional.

4. Belum terpenuhinya Pendidikan dan pelatihan pada setiap aparatur yang berdasarkan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat menjadi hambatan serius dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Permasalahan ini mencakup keterbatasan akses pelatihan, ketidakmerataan penyelenggaraan pelatihan, serta tidak adanya sistem yang terintegrasi untuk pengembangan SDM secara berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh:

1) Keterbatasan Akses Terhadap Pendidikan dan Pelatihan yang Berkualitas

Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan akses bagi aparatur Damkar untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan standar nasional dan peraturan yang berlaku. Banyak petugas tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti

pelatihan yang memenuhi kualifikasi yang ditentukan dalam regulasi, seperti Pelatihan Pemadam Kebakaran Tingkat I, II, dan III atau pelatihan penyelamatan (rescue).

2) Tidak Sesuainya Kurikulum Pelatihan dengan Kebutuhan Lapangan

Pelatihan yang ada sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Kurikulum pelatihan yang disediakan terkadang sudah usang atau tidak memperhatikan perkembangan teknologi dan teknik terbaru dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Hal ini menyebabkan beberapa aparatur tidak terlatih dalam menggunakan peralatan canggih atau menghadapi situasi kebakaran yang lebih kompleks (seperti kebakaran industri atau kebakaran hutan).

3) Ketidakmerataan Pelatihan di Seluruh Wilayah

Penyelenggaraan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau pusat sering kali tidak merata di seluruh wilayah. Daerah-daerah terpencil atau dengan sumber daya terbatas sering tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan daerah pusat, seperti ibu kota kabupaten atau kota besar.

4) Kurangnya Pembaruan dan Pengembangan Kompetensi Secara Berkala

Berdasarkan peraturan yang berlaku, setiap aparatur pemadam kebakaran diharuskan mengikuti pelatihan berkala untuk memastikan mereka selalu up-to-date dengan teknik terbaru dan perubahan peraturan. Namun, pelatihan berkala ini seringkali terabaikan atau tidak dijalankan dengan optimal, baik karena terbatasnya anggaran, waktu, maupun pengorganisasian yang buruk.

5) Belum Ada Sistem Pelatihan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan

Banyak dinas pemadam kebakaran di daerah yang tidak memiliki sistem pelatihan terintegrasi yang mencakup seluruh aspek dari mulai dasar hingga keahlian teknis tinggi. Pelatihan sering kali hanya berbasis pada keperluan jangka pendek, bukan sebagai

bagian dari pembangunan karier dan pengembangan jangka panjang petugas.

6) Kurangnya Standar yang Jelas dan Sistem Evaluasi Pelatihan

Beberapa Dinas Pemadam Kebakaran tidak memiliki sistem evaluasi pelatihan yang jelas dan tidak terstandarisasi, padahal ini penting untuk mengetahui sejauh mana pelatihan dapat meningkatkan keterampilan petugas. Standar pelatihan yang tidak jelas membuat evaluasi tidak objektif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

5. Belum terpenuhinya Regulasi penunjang tugas dan fungsi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Hal ini dapat menciptakan banyak hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan penanggulangan kebakaran yang efektif dan efisien. Penyebabnya antara lain:

1) Ketidakjelasan atau Ketidaklengkapan Regulasi yang Ada

Banyak regulasi yang ada tidak secara rinci mengatur tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran secara menyeluruh, sehingga ada celah yang belum diatur, seperti pengelolaan SDM, penanganan kebakaran industri, penanggulangan kebakaran hutan, dan pemeliharaan peralatan. Beberapa peraturan masih bersifat umum dan tidak spesifik mengenai pembagian kewenangan, misalnya dalam peraturan daerah yang seringkali tidak konsisten dengan regulasi yang ada di tingkat pusat.

2) Fragmentasi dan Tidak Terpadu Antar Regulasi

Banyaknya peraturan yang tidak terintegrasi antara regulasi pusat dan daerah mengenai pemadam kebakaran, terutama terkait dengan standar operasional prosedur (SOP), koordinasi antar lembaga, dan peralatan yang digunakan.

3) Kurangnya Pembaruan dan Pengembangan Regulasi yang Adaptif

Regulasi yang ada terlalu statis dan tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi terbaru dalam pemadaman kebakaran, seperti penggunaan drone, teknologi pemantauan kebakaran berbasis satelit, atau peralatan pemadam kebakaran canggih lainnya.

4) Tidak Ada Pengaturan yang Memadai Tentang Kewenangan dan Tanggung Jawab

Beberapa peraturan daerah (Perda) tidak mengatur secara tegas kewenangan dan tanggung jawab Dinas Pemadam Kebakaran dalam hal pembagian tugas antara penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Hal ini sering kali menimbulkan kebingungan tentang siapa yang bertanggung jawab atas tugas tertentu, terutama di lapangan. Penentuan kewenangan antar lembaga dan instansi lain sering tidak terdefinisikan dengan jelas dalam regulasi.

5) Kurangnya Pengaturan yang Mendukung Aspek Keberlanjutan dan Profesionalisme

Regulasi yang ada lebih berfokus pada tugas pemadaman kebakaran dan kurang mengatur aspek keberlanjutan dalam pengembangan kapasitas SDM, peralatan, dan infrastruktur.

6) Tidak Cukupnya Pengawasan dan Penegakan Hukum mendukung tugas Dinas Pemadam Kebakaran.

Meskipun ada regulasi yang mengatur, namun penegakan hukum dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Dinas Pemadam Kebakaran di banyak daerah masih sangat lemah. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang mengawasi implementasi regulasi tersebut.

7) Tidak Memadai Pengaturan tentang Koordinasi Antarinstansi

Regulasi yang mengatur tentang koordinasi antar instansi (seperti antara Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, Polri, TNI, dan instansi terkait lainnya) masih lemah. Sering kali peraturan hanya mencantumkan prinsip koordinasi tanpa mendetailkan mekanisme koordinasi yang efektif.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis mencakup berbagai urgensi yang menjadi perbincangan di tingkat internasional, nasional, regional, dan lokal, karena relevansinya terhadap kondisi dan perihal yang sangat penting dalam pembangunan daerah, baik pada masa kini maupun masa mendatang.

Isu strategis melibatkan identifikasi isu global, isu nasional, isu regional dan isu lokal yang saling terkait dan terintegrasi. Memahami pentingnya isu strategis, kita dapat meminimalkan risiko kegagalan dan mengambil peluang untuk mendorong kemajuan yang berkelanjutan dalam pembangunan daerah. Isu Strategis pada Dinas Pemadam Kebakaran yaitu “Pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan dan optimalisasi tanggap bencana”.

Tabel 2. 12
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Permendagri No. 114 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran	Belum terpenuhinya pos sektor dan peralatan pemadam kebakaran pada setiap Kecamatan					Pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan dan optimalisasi tanggap bencana
	Belum terpenuhinya Sarana dan Prasarana pada Kelompok Relawan Pemadam Kebakaran					

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Belum terpenuhinya Pendidikan dan pelatihan pada setiap aparatur yang berdasarkan peraturan yang berlaku					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 – 2029

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusnya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang lebih spesifik dan terukur. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan tersebut dirumuskan selaras dengan visi, misi dan prioritas yang akan dicapai. Sebagaimana visi dan misi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2025 – 2029 di tetapkan tujuan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tujuan Perangkat Daerah

MISI 3 RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN
Terbaik dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara	Meningkatnya Penjagaan Kelestarian Lingkungan hidup dan tanggap bencana	Meningkatkan kualitas Layanan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana kebakaran	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub urusan Kebakaran

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 - 2029

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Indikator kinerja sasaran adalah tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap indikator kinerja disertai dengan rencana tingkat capaian (target).

Tabel 3.2 Sasaran Perangkat Daerah

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatkan kualitas Layanan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana kebakaran	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub urusan Kebakaran	Meningkatnya waktu tanggap penanggulangan bencana kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran

Secara keseluruhan Tujuan dan Sasaran serta Indikator dan Target pada Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025 – 2029, dapat disampaikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Kondisi Tanggap dan Penanggulangan Bencana Daerah	Meningkatkan kualitas layanan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran		Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub urusan Kebakaran	Nilai	65	67,8	70,7	73,5	76,3	79,2	82
		Meningkatnya waktu tanggap penanggulangan bencana kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	11,10	11,10	11	10,50	10,35	10,20	10

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029

Strategi Merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam perencanaan tahun 2025 – 2029, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan strategi penahapan sebagai berikut :

Tabel 3.4
 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemetaan kebutuhan pelatihan dan sertifikasi personil	Pelaksanaan pelatihan dasar dan lanjutan	Penguatan kompetensi teknis dan manajerial	Melaksanakakan evaluasi menyeluruh efektivitas pelatihan; memperkuat program pembinaan berkelanjutan dan pelatih bersertifikat daerah	Evaluasi dan penyempurnaan sistem komando; integrasi penuh dengan sistem kebencanaan nasional dan daerah
Identifikasi kebutuhan dan penyusunan rencana pengadaan	Pengadaan peralatan dan kendaraan pemadam	Pembangunan / renovasi pos pemadam baru	Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana yang ada; penataan kembali distribusi kendaraan dan pos pemadam	Melaksanakakan sertifikasi ulang dan peningkatan jenjang kompetensi; menyiapkan kader instruktur internal Damkar
Kajian dan penyusunan SOP tanggap darurat	Implementasi sistem komando terbaru	Integrasi dengan sistem kebencanaan daerah	Penguatan kemitraan dengan dunia usaha, sekolah, dan komunitas dalam program pencegahan	Melaksanakakan Analisis dalam Program Pencegahan tersebut

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029

Arah Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan untuk dijadikan pedoman dalam pengembangan pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Maka perlu ditetapkan suatu arah kebijakan rumusan rangkaian pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Wilayah	Meningkatkan kualitas layanan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4.1 Uraian Program

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan.

Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai dua program yakni, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran. Outcome pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien (DAMKAR). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai indikator nilai sakin perangkat daerah, yang mana pada tahun 2025 adalah 58. Sedangkan, outcome pada Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran diantaranya adalah Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran, Meningkatnya Sarana Prasarana Penyelamatan dan Kebakaran, serta Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran.

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan aktivitas atau tindakan yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu sebagai bagian dari pelaksanaan program kegiatan pada perangkat daerah adalah penjabaran rinci dari aktivitas atau tugas-tugas yang dilakukan oleh

perangkat daerah. Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025.

Ada 8 kegiatan yang dilakukan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; dan
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Sedangkan pada Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran terdapat 5 kegiatan, antara lain:

- 1) Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Investigasi Kejadian Kebakaran;
- 3) Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia;
- 4) Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran;
- 5) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran.

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Sub kegiatan adalah rangkaian aktivitas yang lebih spesifik dan terperinci dari suatu kegiatan, yang dilaksanakan untuk menghasilkan keluaran (output) langsung dalam rangka pencapaian tujuan kegiatan. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia mendanai program prioritas tahunan yang perhitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Antara target yang telah ditetapkan dengan

alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya. Beberapa sub-kegiatan yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diantaranya adalah:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 4) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah;
- 5) Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah;
- 6) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 7) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 8) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- 9) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 10) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD;
- 11) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran;
- 12) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
- 13) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
- 14) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD;
- 15) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
- 16) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
- 17) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
- 18) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
- 19) Pemulangan Pegawai yang Pensiun;
- 20) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- 21) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
- 22) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
- 23) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 24) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 25) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- 26) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- 27) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;

- 28) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan;
- 29) Penyediaan Bahan/Material;
- 30) Fasilitas Kunjungan Tamu;
- 31) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- 32) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
- 33) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
- 34) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- 35) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- 36) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 37) Pengadaan Mebel;
- 38) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 39) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 40) Pengadaan Aset Tak Berwujud;
- 41) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- 42) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- 43) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- 44) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 45) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 46) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- 47) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- 48) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 49) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 50) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
- 51) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;
- 52) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- 53) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- 54) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- 55) Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;

- 56) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- 57) Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran;
- 58) Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- 59) Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri;
- 60) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran;
- 61) Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK);
- 62) Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP);
- 63) Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran;
- 64) Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP);
- 65) Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran;
- 66) Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- 67) Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran;
- 68) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri;
- 69) Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
- 70) Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga;
- 71) Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran;
- 72) Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran;
- 73) Peningkatan kompetensi teknis aparaturnya di bidang pencegahan;
- 74) Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran;
- 75) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi Dan Edukasi Masyarakat;
- 76) Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam kebakaran;

- 77) Dukungan Pemberdayaan Masyarakat / Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana;
- 78) Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia;
- 79) Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi;
- 80) Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi; dan
- 81) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi.

Berikut Tabel teknik merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai berikut:

Tabel 4. 1

Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra

Perangkat Daerah

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatkan Kondisi Tanggapan dan Penanggulangan Bencana Daerah	Meningkatkan kualitas layanan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran				Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatnya Akuntabilitas dan Tata kelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya Akuntabilitas dan Tata kelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	
				Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Laporan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Laporan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang dapat pengamanan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Laporan	Jumlah Laporan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Laporan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau	
					Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Pengadaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Laporan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran			Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran		
		Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran			Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penyelamatan dan Kebakaran			Cakupan Sarana dan Prasarana Penyelamatan dan Kebakaran sesuai Standar dalam Kondisi Baik		
			Kejadian		Jumlah kejadian Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun kebakaran yang di tangani	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	
				Dokumen	Jumlah Dokumen Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan / Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal		
					Jumlah Orang Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	
					Jumlah Desa / Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/ Kelurahan Setiap Tahunnya	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	
					Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran	Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analisis Kebakaran	

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	
					Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	
					Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	
				Dokumen	Jumlah Dokumen inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	
				Dokumen	Jumlah Dokumen Investigasi Kejadian Kebakaran	Investigasi Kejadian Kebakaran	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	
				Dokumen	Jumlah Dokumen Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar)	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulang an Kebakaran Setiap Tahunnya	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi Dan Edukasi Masyarakat	
					Jumlah Desa / Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam kebakaran	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprasi Damkar	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat / Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	
				Dokumen	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Operasi dan Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia / Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	

Tabel 4. 2
Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatk an kualitas layanan pencegahan dan penanggula ngen bencana kebakaran			Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran															
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Tata kelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien		Nilai SAKIP Perangkat Daerah															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			46.31	58	57,128,649,729	60	40,363,016,165	62	39,133,801,948	64	40,439,364,341	66	43,198,119,098	68	45,470,554,080	Sekretar is
		Meningkatnya Akuntabilitas dan Tata kelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah															
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
		Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		18	30	675,000,000	13	600,000,000	23	470,000,000	23	470,000,000	23	560,000,000	23	670,000,000	Sub bagian Penyus unan Program dan Keuang an
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokume n	6	8	200,000,000	2	150,000,000	7	120,000,000	7	120,000,000	7	170,000,000	7	270,000,000	Sub bagian Penyus unan Program dan Keuang an

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10	10	125,000,000.00	2	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	4	70,000,000	4	80,000,000	Sub bagian Penyusunan Program dan Keuangan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	4	100,000,000.00	1	100,000,000	4	80,000,000	4	80,000,000	4	80,000,000	4	80,000,000	Sub bagian Penyusunan Program dan Keuangan
		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	-	3	100,000,000.00	3	50,000,000	3	40,000,000	3	40,000,000	3	40,000,000	3	40,000,000	Sub bagian Penyusunan Program dan Keuangan
		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	-	4	50,000,000.00	4	200,000,000	4	150,000,000	4	150,000,000	4	150,000,000	4	150,000,000	Sub bagian Penyusunan Program dan Keuangan
		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	-	1	100,000,000.00	1	50,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	Sub bagian Penyusunan Program dan Keuangan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel		960	281	27,975,051,629	1072	27,760,051,629 ₉	1072	27,755,051,629 ₉	1072	27,755,051,629 ₉	1072	27,805,051,629 ₉	1072	28,055,051,629 ₉	Sub bagian Penyusunan Program dan Keuangan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	935	217	27,465,051,629.48	1008	27,465,051,629.48	1008	27,465,051,629.48	1008	27,465,051,629.48	1008	27,465,051,629.48	1008	27,465,051,629.48	Sub bagian Penyusunan Program dan Keuangan
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	50	100,000,000.00	50	50,000,000.00	50	40,000,000.00	50	40,000,000.00	50	40,000,000.00	50	40,000,000.00	Sub bagian Penyusunan Program dan Keuangan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	30,000,000.00	1	50,000,000.00	1	35,000,000.00	1	35,000,000.00	1	35,000,000.00	1	35,000,000.00	Sub bagian Penyusunan Program dan Keuangan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	12	12	350,000,000.00	12	180,000,000.00	12	200,000,000.00	12	200,000,000.00	12	250,000,000.00	12	500,000,000.00	Sub bagian Penyusunan Program dan Keuangan
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	-	1	30,000,000.00	1	15,000,000.00	1	15,000,000.00	1	15,000,000.00	1	15,000,000.00	1	15,000,000.00	Sub bagian Penyusunan Program dan Keuangan
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang dapat pengamanan		-	3	55,000,000	24	85,000,000	24	70,000,000	24	70,000,000	24	70,000,000	24	70,000,000	Sub bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	2	25,000,000	1	30,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	Sub bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	-	-	3	30,000,000	3	30,000,000	3	30,000,000	3	30,000,000	3	30,000,000	Sub bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	-	1	30,000,000	20	25,000,000	20	25,000,000	20	25,000,000	20	25,000,000	20	25,000,000	Sub bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
		Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		59	-	-	43	210,000,000	60	125,000,000	60	125,000,000	60	125,000,000	60	125,000,000	Sub bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	-	-	-	15	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	4	-	-	-	-	-	-	4	100,000,000	-	-	-	-	Sub bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																		waian
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	-	-	-	4	25,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	-	-	-	4	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	-	-	10	100,000,000	10	100,000,000	-	-	10	100,000,000	10	100,000,000	Sub bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50	-	-	-	-	50	25,000,000	50	25,000,000	50	25,000,000	50	25,000,000	Sub bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	-	-	10	25,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																
		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		142	82	970,000,000	86	600,000,000	76	515,000,000	76	581,348,176	83	1,515,000,000	88	1,965,000,000	Sub bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	10	20,000,000	6	10,000,000	6	10,000,000	6	10,000,000	6	10,000,000	6	10,000,000	Sub bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20	-	-	1	200,000,000	3	150,000,000	3	150,000,000	10	1,000,000,000	15	1,500,000,000	Sub bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	2	50,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	Sub bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	2	50,000,000	2	55,000,000	2	55,000,000	2	55,000,000	2	55,000,000	2	55,000,000	Sub bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	Sub bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50,000,000	-	-	Sub bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	6	10	300,000,000	3	50,000,000	3	50,000,000	3	50,000,000	3	50,000,000	3	50,000,000	Sub bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	-	5	50,000,000	10	30,000,000	3	15,000,000	3	15,000,000	3	15,000,000	3	15,000,000	Sub bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	70	45	300,000,000	50	100,000,000	50	100,000,000	50	166,348,175.86	50	200,000,000.00	50	200,000,000.00	Sub bagian Umum, Ketatala ksanaa n dan Kepega waian
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokume n	3	3	100,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	Sub bagian Umum, Ketatala ksanaa n dan Kepega waian
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokume n	5	4	50,000,000	10	50,000,000	5	30,000,000	5	30,000,000	5	30,000,000	5	30,000,000	Sub bagian Umum, Ketatala ksanaa n dan Kepega waian
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
		Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah		12	170	15,550,000,000	31	2,520,000,000	21	1,710,785,782	20	2,600,000,000	22	4,135,102,933	23	5,597,537,915	Sub bagian Umum, Ketatala ksanaa n dan Kepega waian
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	-	150	1,500,000,000	1	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub bagian Umum, Ketatala ksanaa n dan Kepega waian
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	-	5	2,250,000,000	-	-	5	1,000,000,000	2	800,000,000	2	900,000,000	2	900,000,000	Sub bagian Umum, Ketatala ksanaa n dan Kepega waian

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	-	1	3,000,000,000	2	830,000,000	-	-	-	-	2	1,435,102,932.61	2	1,585,102,932.61	Sub bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	2	5	400,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	5	900,000,000	Sub bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	5	10	200,000,000	5	10,000,000	-	-	-	-	-	-	10	212,434,982.36	Sub bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	unit	3	-	-	-	-	-	-	2	400,000,000	-	-	-	-	Sub bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	unit	-	-	-	2	180,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	2	2	8,200,000,000	1	1,000,000,000	1	710,785,782	1	1,000,000,000	3	1,800,000,000	4	2,000,000,000	Sub bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	-	-	-	-	-	-	-	2	400,000,000	-	-	-	-	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang disediakan		24	60	7,658,617,200	61	7,167,964,536	61	7,167,964,536	61	7,167,964,536	61	7,267,964,536	61	7,267,964,536	Sub bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	-	-	n.a	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	48	834,529,200.00	48	720,000,000	48	720,000,000	48	720,000,000	48	820,000,000	48	820,000,000	Sub bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	6,824,088,000	12	6,442,964,536	12	6,442,964,536	12	6,442,964,536	12	6,442,964,536	12	6,442,964,536	Sub bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
		Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah		87	94	4,244,980,900	107	1,420,000,000	102	1,320,000,000	102	1,670,000,000	102	1,720,000,000	102	1,720,000,000	Sub bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	-	-	-	5	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	55	40	2,064,980,900	40	500,000,000	40	650,000,000	40	950,000,000	40	1,000,000,000	40	1,000,000,000	Sub bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	50	80,000,000	60	60,000,000	60	60,000,000	60	60,000,000	60	60,000,000	60	60,000,000	Sub bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	2	1	2,000,000,000	2	660,000,000	2	610,000,000	2	660,000,000	2	660,000,000	2	660,000,000	Sub bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	-	2	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	2	50,000,000	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Sub bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			100	100	113,574,749,173	100	6,018,500,000	100	2,445,000,000	100	2,725,000,000	100	3,145,000,000	100	3,395,000,000	Bidang Pencegahan, Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, dan Bidang Pengadaan Sarana dan Prasarana

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
		Meningkatkan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penyelamatan dan Kebakaran	Cakupan Sarana dan Prasarana Penyelamatan dan Kebakaran sesuai Standar dalam kondisi baik	Persen	64.04	65		66		68		70		72		74		
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota																
		Meningkatnya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun kebakaran	Jumlah kejadian Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun kebakaran yang ditangani	Kejadian		6454	54,264,832,673	166	4,943,500,000	170	1,720,000,000	172	1,970,000,000	187	2,270,000,000	212	2,520,000,000	Bidang Pencegahan, Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, dan Bidang Pengadaan Sarana dan Prasarana
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Pe nanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap	dokumen	26	10	159,158,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	Bidang Pencegahan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tahunnya															
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	laporan	60	60	400,000,000	60	400,000,000	60	250,000,000	60	250,000,000	60	250,000,000	60	250,000,000	Bidang Pemadaman dan Penyelamatan
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	dokumen	12	80	300,000,000	70	300,000,000	70	150,000,000	70	150,000,000	70	150,000,000	70	150,000,000	Bidang Pemadaman dan Penyelamatan
		Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	2	2	50,000,000	10	50,000,000	10	30,000,000	10	30,000,000	10	30,000,000	10	30,000,000	Bidang Pemadaman dan Penyelamatan
		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	dokumen	-	1	200,000,000	1	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pengadaan Sarana dan Prasarana

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Orang Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulanga n Kebakaran	orang	424	88	1,718,000,000	79	675,000,000	8	250,000,000	10	300,000,000	20	500,000,000	50	850,000,000	Bidang Pencega han
		Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa / Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa /Keluraha n Setiap Tahunnya	desa/ke lurahan	-	6	75,000,000	6	75,000,000	6	75,000,000	6	75,000,000	6	75,000,000	6	75,000,000	Bidang Pengada an Sarana dan Prasara na
		Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulanga n Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	dokume n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50,000,000	-	-	Bidang Pencega han
		Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	laporan	120	20	83,350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pencega han

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulanga n Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	dokume n	-	1	150,000,000	1	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pencega han
		Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran	dokume n	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pencega han
		Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulanga n Kebakaran dan Penyelamatan	dokume n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50,000,000	-	-	Bidang Pencega han
		Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran	dokume n	-	-	-	5	37,500,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	Bidang Pencega han
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulanga n Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	unit	55	6373	51,079,324,673	23	3,036,000,000	20	800,000,000	20	1,000,000,000	20	1,000,000,000	20	1,000,000,000	Bidang Pengada an Sarana dan Prasara na
		Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulanga n Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	dokume n	7	5	50,000,000	30	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	Bidang Pemada man dan Penyela matan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Keluarga/KK	-	200	146,610,000	100	100,000,000	75	75,000,000	75	75,000,000	75	75,000,000	75	75,000,000	Bidang Pencegahan
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran																
		Meningkatnya kualitas peralatan proteksi kebakaran	Jumlah Peralatan Proteksi kebakaran yang di inspeksi			58	346,320,000	22	145,000,000	20	100,000,000	20	100,000,000	20	100,000,000	20	100,000,000	Bidang Pencegahan
		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	-	10	150,000,000	10	85,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000	Bidang Pencegahan
		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen	-	48	196,320,000	12	60,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000	Bidang Pencegahan
		Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang pencegahan	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pencegahan
		Investigasi Kejadian Kebakaran																

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Meningkatnya Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah Kejadian Kebakaran yang di investigasi			1	50,000,000	1	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pemada man dan Penyela matan
		Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	Dokume n	-	1	50,000,000	1	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pemada man dan Penyela matan
		Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran																
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah warga yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Dalam Pencegahan Kebakaran		5604	7177	1,241,785,000	5821	450,000,000	520	300,000,000	520	300,000,000	520	300,000,000	520	300,000,000	Bidang Pencega han
		Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi Dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulanga n Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	5507	7100	459,930,000	5800	200,000,000	500	100,000,000	500	100,000,000	500	100,000,000	500	100,000,000	Bidang Pencega han
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam kebakaran	Jumlah Desa / Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/ke lurahan	69	45	461,855,000	20	200,000,000	15	150,000,000	15	150,000,000	15	150,000,000	15	150,000,000	Bidang Pencega han

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Dukungan Pemberdayaan Masyarakat / Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprass Damkar	desa/ke lurahan	28	32	320,000,000	1	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	Bidang Pencegahan
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia																
		Meningkatnya Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Penyelenggaraan Operasi dan Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan Manusia		927	4078	57,671,811,500	791	430000000	314	325,000,000	315	355,000,000	315	475,000,000	315	475,000,000	Bidang Pencegahan, Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, dan Bidang Pengadaan Sarana dan Prasarana
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan	12	300	200,000,000	300	150,000,000	300	100,000,000	300	100,000,000	300	120,000,000	300	120,000,000	Bidang Pemadaman dan Penyelamatan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	Dokumen	-	1	200,000,000	1	5,000,000.00	-	-	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	Bidang Pengadaan Sarana dan Prasarana
		Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia / Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Laporan	840	210	513,345,000	3	75,000,000.00	4	25,000,000	4	25,000,000	4	25,000,000	4	25,000,000	Bidang Pencegahan
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	75	3567	56,758,466,500	487	200,000,000.00	10	200,000,000.00	10	200,000,000.00	10	300,000,000.00	10	300,000,000.00	Bidang Pengadaan Sarana dan Prasarana
							170,703,398,902		46,381,516,165		41,578,801,947.72		43,164,364,341.34		46,343,119,098.09		48,865,554,080.45	

Tabel 4. 3

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan Prioritas	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran			
			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		
				Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	SPM
				Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	SPM
				Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	SPM
				Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	SPM

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan Prioritas	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	SPM
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	SPM
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		SPM
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	SPM
				Pembentukan dan Pembinaan Relawan	SPM
				Pemadam Kebakaran Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan	SPM

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan Prioritas	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Prasarana	
			Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		
				Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	SPM
				Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	SPM
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	SPM
				Pembinaan Aparatur	SPM

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan Prioritas	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	

Sumber: Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021

4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 4
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	46.31	58	60	62	64	66	68	
2	Rata-rata Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	11.2	15	15	15	15	15	15	
3	Jumlah Pembentukan Relawan Kebakaran (redkar)	Desa/ Kelurahan	74	5	20	25	30	35	40	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	Persentase Pemenuhan Layanan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan dan atau/ mengancam keselamatan manusia	Persen	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber: Indikator Kinerja Utama, 2025

4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 5

Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	87.72	100	100	100	100	100	100	

Sumber : Indikator Kinerja Kunci, 2025

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah, yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara setiap tahunnya.

Indikator dan target kinerja pembangunan daerah yang tercantum dalam Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025-2029 ini wajib dipenuhi untuk mendukung tercapainya kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran daerah.

Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Karena itu, dibutuhkan partisipasi, semangat, komitmen, tanggung jawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pelaksanaan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan melalui Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara setiap tahun dan realisasinya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan instrumen penting dalam menjamin ketercapaian tujuan, sasaran, serta program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

Pengendalian pelaksanaan Renstra dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan secara berkala terhadap capaian kinerja program dan kegiatan, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan. Kegiatan pengendalian dilaksanakan secara berjenjang oleh pimpinan dan seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten

Kutai Kartanegara, dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan serta memanfaatkan sistem perencanaan dan pelaporan kinerja daerah. Melalui pengendalian yang sistematis, setiap potensi permasalahan, hambatan, maupun penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara tepat waktu.

Evaluasi pelaksanaan Renstra dilaksanakan secara periodik untuk menilai tingkat pencapaian sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil evaluasi menjadi bahan penting dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan, penyempurnaan kebijakan, dan penyesuaian strategi pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

Dengan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang konsisten dan berkelanjutan, diharapkan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat diimplementasikan secara optimal, adaptif terhadap dinamika dan karakteristik wilayah, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan rasa aman, perlindungan, dan keselamatan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dari hasil evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Renja akan dikeluarkannya rekomendasi untuk menentukan melanjutkan kebijakan atau harus melakukan perubahan kebijakan dan program pembangunan yang dituangkan pada Rencana Periode berikutnya.

Implementasi Renstra ini mensyaratkan pentingnya sinkronisasi dan koordinasi lintas bidang dengan tetap memperhatikan peran, kewenangan, tanggung jawab dan tugas masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sikap yang mengedepankan ego sektoral harus dihilangkan agar terjadi sinergisitas, efisiensi dan akselerasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam kaitan tersebut, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dalam mengawal implementasi Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2029 yang meliputi:

1. Setiap elemen dalam lingkup Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dengan sebaik-baiknya;
2. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan tersebut;

3. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana tersebut;
4. Apabila terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mengakibatkan terjadinya perubahan komposisi Renstra
Pendahuluan ini, maka perlu dilakukan penyesuaian.

Akhir kata semoga Rancangan Akhir Renstra ini dapat menjadi instrumen kunci pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara selama 5 Tahun periode mendatang.

Tenggarong, 15 Januari 2026
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Baharuddin Syafruddin, ST	Plt. Sekretaris	
2	Wiradi Yusda, SE	Kasubbag. Penyusunan Program dan Keuangan	

H. Fida Hurasani, S.Sos
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 19731101 200012 1 003